



Jembatan Garuda Tunggu Rekomendasi Kemen-PUPR

PONTIANAK, TRIBUN - Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengatakan terkait dengan wacana pembangunan jembatan Garuda Bardan Nadi-Siantan, Pontianak, saat ini masih menunggu rekomendasi dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen-PUPR).

"Untuk *ground breaking* nya masih belum ditentukan waktunya, karena harus mendapat rekomendasi dulu dari kementerian PUPR yang sekarang sedang diproses," ujarnya, Sabtu (4/2).

Hal tersebut ia sampaikan lantaran, berkaitan dengan regulasi Peraturan Presiden Nomor 38 tahun 2015 tentang KPBU, PerMen Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas nomor 2 tahun 2020 tentang tata cara Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dalam Penyediaan Infrastruktur. Kemudian Peraturan Kepala LKPP nomor 29 tahun 2018 tentang tata cara pelaksanaan KPBU dan Perda RT/RW Kota Pontianak 2013-2033 masalah teknis lainnya.

Selain itu, Wako Edi juga menjelaskan tentang tujuan pembangunan tersebut. "Tujuan pembangunan tentu untuk menghubungkan Pontianak Kota ke Pontianak Utara sehingga akan berdampak terhadap kemajuan dan pertumbuhan ekonomi dan banyak manfaat lainnya," jelasnya.

Dihubungi terpisah Gubernur Kalbar Sutarmidji mendukung rencana pembangunan Jembatan Garuda di Pontianak yang dilakukan oleh pi-

■ Bersambung ke hal. 7



Jembatan Garuda Tunggu Rekomendasi Kemen-PUPR

Sambungan Hal.3

hak swasta melalui investasi tersebut. "Artinya ini adalah investasi dan silakan saja, tapi kalau dia PMA harus Kementerian PU. Kalau saya lebih bagus di Pontianak ini dibangun Jembatan Kapuas 3," ujarnya, Sabtu (4/2).

Ketika nantinya Jembatan Kapuas 3 ada, maka Jembatan Garuda itu investasinya untuk *breaking point*-nya harus dihitung kembali berapa tahun. "Itu kan berbayar, nanti misalnya perlu 20 tahun, ketika Jembatan Kapuas 3 jadi harus nambah hitungan itu supaya jangan sampai investor salah hitung," jelasnya.

Ia mengatakan tentu sangat mendukung rencana Jembatan Garuda ini, yang merupakan investasi pihak swasta. "Inikan investasi pihak swasta yang bagus-bagus saja. Apalagi Pontianak Utara lahannya milik Pemkot, dan sebelah sini kita (Pemprov). Cuma harusnya ada jalan layang untuk turunannya yang juga harus ada. Saya rasa bagus dan kita dukung pembangunan ini," ungkapnya.

Dikatakannya dukungan tersebut ia berikan kepada Wako Pontianak yang mana Jembatan Garuda ini merupakan investasi murni dari swasta.

DPRD: Kaji Serius

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pontianak memberikan tanggapan dingin terkait dengan wacana pembangunan Jembatan Garuda Bardan Nadi-Siantan Pontianak Kalimantan Barat oleh pihak ketiga yang memakan alokasi anggaran hingga mencapai Rp1 triliun.

Pasalnya dari penuturan DPRD Kota, hingga saat ini Wali Kota Pontianak belum pernah sedikitpun membicarakan rencana pembangunan

Jembatan Garuda ini kepada perwakilan legislatif.

"Secara keseluruhan kita belum mendengar pasti tentang kesepakatan Wali Kota Pontianak dengan investor Cina yang bakal mengucurkan dana buat Jembatan Garuda itu. Kabarannya anggaran yang dialokasikan mencapai Rp 1 triliun. Kalau dari kami (DPRD) belum menyatakan setuju untuk dibangun. Sebab harus dikaji serius," ungkap Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Pontianak Mujiono.

Dari informasi yang diperoleh, bahwa Jembatan Garuda ini memiliki arsitektur indah sehingga menjadi mimpi indah bagi warga Kota jika terwujud. "Tapi dalam proses pembangunannya, apakah Wali Kota sudah melewati tahapannya dengan benar. Karena ini melibatkan banyak pihak. Mulai dari Pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Kalbar dan Pemkot Pontianak," terangnya.

Apalagi alokasi anggaran dikucurkan oleh pihak ke tiga. Pastinya DPRD perlu tahu perjanjian hingga Jembatan Garuda ini dibangun. Termasuk pengelolaannya. Menurut dia, jika pembangunan dilakukan oleh pihak swasta, biasanya menggunakan jangka waktu. Seperti dicontohkannya, Pasar Mawar yang bangunan menggunakan dana swasta. Alhasil, untuk pungutan retribusi tak bisa ditarik Pemkot.

"Sehingga kecil sumbangan PAD yang didapat oleh Pemkot Pontianak. Untuk rehap pun kita tak bisa. Sebab pinjaman pakai ini masa berlakunya panjang. Kewenangan pengelolaan pun ada dipihak swasta," terangnya.

Begitupula dengan Khatulistiwa Plaza. Ini pengelolaannya ada di pihak ke tiga. Mereka berwenang dalam menentu-

kan tarif sewa kios di sana. "Jangan sampai cerita Jembatan Garuda ini konsepnya sama dengan Pasar Mawar dan KP atau Khatulistiwa Plaza. Kemudian jika dilihat secara hukum dengan melihat Perda Tata Ruang Provinsi, Tata Ruang Pontianak kemudian perda lainnya apakah rencana pembangunan Jembatan Garuda ini tidak terjadi benturan secara regulasi.

Ia pun menanyakan soal perjanjian antara Wali Kota dan pihak ke tiga selaku pemegang dananya. Apakah pinjaman pakai kemudian pihak swasta mendapatkan cuan dari biaya tarif penggunaan Jembatan Garuda atau ada aturan lain yang sudah mereka susun. "Jika ini dikelola swasta pasti hitungannya untung rugi. Nanti takutnya mereka menentukan tarif tinggi. Sehingga hanya bisa digunakan oleh masyarakat mampu saja," ujarnya.

Mujiono mengatakan perlu dipertimbangkan semuanya. Mulai dari aspek hukum, sosial, ekonomi dan dampak lain yang berpotensi terjadi. Seperti keberadaan pedagang kaki lima di sekitar jembatan yang akan dibangun (Bardan-Siantan). Para penambang perahu belum lagi cerita lahan-lahan yang bakal dibebaskan. "Ini perlu menjadi perhatian Pak Wali. Jangan hanya mimpi indah saja dilemparkan ke masyarakat. Tahu-tahu yang terjadi nanti malah mimpi buruk yang kita dapat," ujarnya.

Secara keseluruhan, legislatif mendukung adanya pembangunan. Tetapi mesti memiliki manfaat banyak bagi masyarakat. Ia pun minta Wali Kota melalui Bappeda memaparkan dulu rencana pembangunan

ini. Mulai dari sisi hukum, ekonomi dan sosial. "Harus detail," tegasnya.

Jangan sampai di tataran atas sudah setuju akan melakukan pembangunan. Namun ditataran akar, semuanya belum beres. Kesiapan ditataran bawah ini penting untuk dilihat. "Kalau hanya mementingkan pihak swasta namun tidak ada untung bagi daerah sebaiknya mesti dipikirkan lagi," ujarnya.

Hal senada dikatakan Anggota DPRD Kota Pontianak Mansyur. "Sampai saat ini saya baru baca berita online nasional. Tapi kalau secara resmi pemkot beri info bangun jembatan belum ada," ungkapnya.

Dia pribadi memberi apresiasi tinggi atas inisiatif pemkot untuk membangun kota ini melalui investor luar negeri. Namun akan hal ini DPRD melihat beberapa aspek mulai dari yuridis, sosial, filosofis dan ekonomisnya.

Kemudian jika melihat dari sisi aturan Permendagri nomor 20 tahun 2010 tentang tata cara kerjasama pemerintah daerah dan pemerintah lainnya dan pihak ke tiga. Dalam pasal 6 menyatakan bahwa untuk penyelenggaraan kerjasama daerah dengan pihak ke tiga harus ada persiapan. Mulai dari penawaran, penyusunan, kesepakatan bersama, kemudian penandatanganan kesepakatan bersama kemudian persetujuan DPRD. Barulah pelaksanaan dan penatausahaan dan laporan. "Di Pasal 6 ini ada persetujuan DPRD. Tapi ini kami belum tahu," tegasnya.

Ia minta Pemkot harus mengkaji kembali. Utamanya dari aspek yang ia sebutkan itu. Sebab jika tidak dikaji ia takut pembangunan ini malah jadi bomerang bagi Pemkot Pontianak. (oki/ang)